**BAB** **I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Penelitian**

Studi Hubungan Internasional didefinisikan sebagai studi hubungan antar negara. Dimana hubungan tersebut hanya terbatas pada keamanan dan perang. Definisi mengenai hubungan internasional kemudian mulai berubah seiring dengan bertambahnya aktor-aktor dalam politik dunia dan dengan bentuk hubungan yang lebih kompleks. Kini dapat dikatakan bahwa hubungan internasional adalah ilmu yang membahas mengenai hubungan-hubungan antar aktor, baik itu negara, non negara (seperti organisasi internasional dan perusahaan multinasional) bahkan individu di dalam sistem internasional (Olivia, 2012).

Perkembangan hubungan internasional juga memiliki implikasi pada isu-isu yang dibahas dalam hubungan internasional, hubungan internasional tidak lagi terfokus pada hal-hal yang bersifat konvensional seperti perang dan konflik, isu-isu kebutuhan dasar manusia seperti ekonomi, sosial, pendidikan, lingkungan hidup, kesehatan juga menjadi perhatian dari hubungan internasional sehingga memunculkan hubungan internasional yang kontemporer.

Hubungan internasional yang kontemporer tidak hanya memperhatikan politik antar negara tetapi juga dengan subjek lain seperti interdependensia ekonomi, hak asasi manusia, perusahaan transnasional, organisasi internasional, lingkungan hidup, ketimpangan gender, keterbelakangan, dan lain-lain (Jackson & Soresen, 1999).

Berbagai kecenderungan baru yang tengah melanda Dunia membawa berbagai konsekuensi baru terhadap interaksi global, seperti yang dikatakan Stanley Hoffman bahwa “*our world becomes more and more complex*”(Hoffman, 1998).

Negara-negara di dunia serta organisasi internasional mulai berkomitmen untuk melakukan perbaikan taraf hidup dan pembangunan berdasarkan prinsip-prinsip kemanusian bagi seluruh umat manusia. Salah satu aktor hubungan internasional yang berperan dalam hal ini adalah *United Nations Children’s Emergency Fund* (UNICEF).

UNICEF merupakan sebuah organisasi anak yang berdiri dibawah PBB, dan didirikan setelah Perang Dunia II pada tahun 1946. UNICEF bekerja diseluruh dunia untuk menanggulangi kemiskinan, kekerasan terhadap anak dan perempuan, wabah penyakit, diskriminasi, serta pendidikan. Tujuan utama dari organisasi ini adalah untuk memberikan perawatan kesehatan yang layak dan menyediakan makanan untuk anak-anak dan perempuan di seluruh dunia.

Sebagai Lembaga yang peduli terhadap permasalahan anak, UNICEF membantu menyediakan infrastruktur pendidikan dasar di dunia, meningkatkan tingkat hidup anak di negara berkembang, kesetaraan gender melalui pendidikan bagi perempuan, memberikan perlindungan bagi anak-anak terhadap kekerasan dan pelecehan seksual, imunisasi bayi dari berbagai penyakit, dan penyediaan gizi yang memadai dan air minum yang aman untuk anak-anak.

UNICEF adalah bagian dari suatu pola hubungan kerjasama yang mengkaitkan berbagai lembaga pembangunan PBB dan badan-badan pemberi bantuan bilateral dan *Non-Governmental Organizations* (NGOs) dengan memperoleh dana dari berbagai sumber dan menciptakan berbagai keterampilan teknis dan operasional untuk memperkuat keefektifan suatu program yang ikut memanfaatkan dana yang ada pada UNICEF (*Kerjasama Pemerintah Indonesia-Unicef*, t.t.).

Kemitraan UNICEF dan Indonesia terjalin pertama kali pada tahun 1948, saat terjadi situasi darurat yang memerlukan penanganan cepat pada kekeringan yang terjadi di Lombok. Kemudian kerjasama resmi Indonesia dan UNICEF dijalin pertama kali pada tahun 1950. Sejak masa awal kemerdekaan, UNICEF telah menjadi mitra tetap Indonesia dalam berkomitmen untuk memperbaiki taraf hidup anak-anak dan wanita di Indonesia. Program-program UNICEF di Indonesia saat ini mencakup serangkaian isu seperti Kesehatan Gizi ibu dan anak, Pendidikan dasar dan Kesehatan untuk semua, Perlindungan anak, Memerangi HIV/Aids, serta Air dan Kebersihan Lingkungan (Nurul, 2014).

Salah satu bentuk kerjasama yang dilakukan Indonesia-UNICEF adalah kerjasama dalam bidang pendidikan di Tanah Papua (Papua dan Papua Barat), hal ini tidak terlepas dari kondisi pendidikan di dua provinsi tersebut yang jauh tertinggal dari rata-rata pendidikan nasional. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan 20% dari APBN, nyatanya tak menjamin pendistribusian pendidikan yang merata. Unicef mencatat 30% siswa Papua tidak menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama. Sementara di pedalaman, sekitar 50% siswa SD dan 73% siswa SMP memilih putus sekolah. Tingkat pendidikan yang rendah itu berimbas pada indeks pembangunan manusia masyarakat Papua (Dirhantoro, 2017).

Menurut catatan Wikipedia, Papua dan Papua Barat menempati posisi terendah dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM), berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia pada tahun 2017, nilai IPM keseluruhan Indonesia adalah 70,81% dengan nilai IPM tertinggi berada di provinsi [DKI Jakarta](https://id.wikipedia.org/wiki/DKI_Jakarta) sebesar 80,06% dan terendah berada di provinsi [Papua](https://id.wikipedia.org/wiki/Papua) sebesar 59,09% dan Papua Barat 62,99%. Indeks pembangunan yang rendah di Tanah Papua disebabkan karena kualitas pendidikan yang buruk, tingkat buta huruf yang tinggi, kesehatan yang rendah, serta kemiskinan sehingga berdampak pada rendahnya kualitas sumber daya manusia di Papua.

 Sementara dalam aspek literasi, Papua menjadi provinsi dengan persentase penduduk tuna aksara yang tertinggi. Berdasarkan data Kemendikbud, penduduk tuna aksara berusia 15-59 tahun di Papua mencapai 28,61%. Sementara Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan 10,62%, dan Sulawesi Barat di posisi ketiga dengan 7,63% (Puspitasari, 2016). Kurangnya akses layanan pendidikan berkualitas, buku bacaan, dan tenaga pendidik mengakibatkan tingginya angka anak yang tidak bisa membaca dan menulis di Papua hingga mencapai 48% (*Papua Reads*, 2018).

Menurut data dari *Multiple Indicator Cluster Survey* (MICS) tahun 2011 dan *Indonesian Demogrhapic and Health Survey* (IDHS) tahun 2012 menunjukkan masih ada kesenjangan ekuitas yang signifikan di Papua dan Papua Barat berdasarkan distribusi geografis, kekayaan, perkotaan, perdesaan, penduduk asli dan non-pribumi. Secara umum, anak-anak di daerah pedesaan menghadapi hambatan yang signifikan untuk mengakses layanan pendidikan yang efektif. Hal ini terkait dengan lemahnya pengetahuan pedagogis para guru, buruknya kualitas pengajaran dan adanya hukuman fisik, dan rendahnya nilai terkait dengan sekolah oleh siswa dan orang tua.

Dalam mendukung upaya Pemerintah Indonesia untuk mengatasi kesenjangan Pendidikan di Papua dan Papua Barat, UNICEF dengan dukungan finansial dari Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia mengimplementasikan program *Rural and Remote Education Initiative for Papuan Provinces*. Program ini bertujuan untuk menguji pendekatan yang efektif dan berkelanjutan untuk meningkatkan keterampilan membaca siswa kelas awal/dasar (kelas 2 & 3) di daerah pedesaan dan terpencil di Papua dan Papua Barat. Dengan hasil akhir peningkatan keterampilan membaca anak-anak siswa kelas dasar, peningkatan keterampilan guru dalam mengajar, serta meningkatkan kesadaran masyarakat dan pemerintah daerah setempat terkait pendidikan.

Beroperasi dibawah kemitraan antara Pemerintah Indonesia dan UNICEF, program ini merupakan bagian dari program kerjasama lima tahunan UNICEF dan Pemerintah Indonesia, yaitu UNICEF-Indonesia *Country Programme of Cooperation* 2016-2020, dalam konteks *the new Country Programme Action Plan* (CPAP) 2016-2020 yang disepakati antara Pemerintah Indonesia dan UNICEF pada bulan Desember 2015, program ini akan membantu mencapai hasil yang bertujuan untuk mewujudkan hak-hak bagi semua anak (Pendidikan, Kesehatan, perlindungan terhadap kekerasan dan pelecehan).

Dalam implementasinya, program ini menargetkan 120 sekolah dari 6 kabupaten di Papua dan Papua Barat. Yakni, 4 Kabupaten di Papua diantaranya Biak, Jayawijaya, Jayapura, dan Mimika. Dan 2 kabupaten di Papua Barat, diantaranya adalah Sorong dan Manokwari. 6 kabupaten tersebut merupakan hasil konsultasi UNICEF dan pemerintah daerah terkait untuk kemudian diikutsertakan dalam *Piloting Project* (Mufti, 2019).

 Program *Rural and Remote Education and Initiative for Papuan Provinces* dilaksanakan melalui dua pilar/pendekatan secara terkoordinasi melalui mitra lokal yang mengelola unsur-unsur berbasis sekolah (Pilar 1) juga melibatkan pejabat pemerintah daerah setempat dan anggota parlemen tentang kemajuan kegiatan yang dilaksanakan di sekolah (Pilar 2).

Tujuan akhir dari hasil program kerjasama ini adalah meningkatkan literasi kelas awal disekolah-sekolah sasaran, perubahan perilaku guru dan praktik mengajar di ruang kelas, memberikan saran teknis untuk pejabat pendidikan kabupaten terkait tentang perencanaan dan penganggaran yang adil. Tujuan keseluruhan atau sasaran dari program ini adalah untuk menguji pendekatan yang efektif dan berkelanjutan untuk peningkatan hasil keaksaraan di tingkat awal di daerah pedesaan dan terpencil di provinsi Papua dan Papua Barat.

Program ini konsisten dengan kebijakan pemerintah Australia dan Indonesia serta kebijakan UNICEF yang membahas mengenai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) 4, yaitu untuk memastikan pendidikan berkualitas inklusif dan adil dan mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua anak.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk menganalisa kerjasama UNICEF-Indonesia yang berfokus pada peningkatan pendidikan untuk anak-anak di Papua. Hal inilah yang menjadi latar belakang penulis untuk membuat penelitian dengan judul:

**“Kerjasama Indonesia-UNICEF melalui Program *Rural and Remote Education Initiative for Papuan Provinces* dalam Meningkatkan Pendidikan di Papua*”***

1. **Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diutarakan di atas, maka dapat di identifikasikan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kerjasama Indonesia-UNICEF?
2. Bagaimana kondisi pendidikan di Papua?
3. Bagaimana program *Rural and Remote Education Initiative for Papuan Provinces* menangani pendidikan di Papua?
4. **Pembatasan Masalah**

Karena luasnya permasalahan yang ada, maka peneliti membatasi masalah dengan menitikberatkan pada, **“Kerjasama Indonesia-UNICEF melalui Program *Rural and Remote Education Initiative for Papuan Provinces* dalam Meningkatkan Pendidikan di Papua 2015-2018”**

1. **Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: **“Bagaimana implementasi program *Rural and Remote Education Initiative for Papuan Provinces* dalam meningkatkan pendidikan di Papua?”**

1. **Tujuan dan Kegunaan Penelitian**
2. **Tujuan Penelitian**

Suatu kegiatan yang dilakukan hendaknya memiliki tujuan yang hendak dicapai. Adapun tujuan dari penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Menjelaskan tentang bentuk kerjasama Indonesia dan UNICEF secara umum.
2. Untuk mengetahui kondisi pendidikan di Tanah Papua (Papua dan Papua Barat).
3. Untuk mengetahui bagaimana program *Rural and Remote Education Initiative for Papuan Provinces* meningkatkan pendidikan di Papua dan Papua Barat.
4. **Kegunaan Penelitian**
5. **Kegunaan Teoritis**
6. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam melaksanakan penelitian yang berpedoman pada metode dan teknik ilmiah.
7. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian sarjana strata satu Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Pasundan Bandung.
8. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah pengetahuan mengenai kerjasama internasional antara Indonesia dan UNICEF di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Pasundan Bandung.

**b. Kegunaan Praktis**

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis dalam mengembangkan kemampuan secara nalar dan dapat menjadi referensi bagi pihak-pihak yang berminat dalam meneliti masalah-masalah Hubungan Internasional khususnya mengenai kerjasama Indonesia-UNICEF.
2. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi lebih lanjut terkait kondisi pendidikan di Papua dan dapat menjadi sebuah informasi bagi negara dalam mengelola sistem pendidikan di Indonesia.
3. Diharapkan dapat memberikan wawasan bagi para peneliti dan para akademis ilmu Hubungan Internasional mengenai kerjasama UNICEF dian Indonesia khususnya dalam menangani Pendidikan di Papua.